

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Organisasi tersebut menjalankan standar kinerja yang dievaluasi melalui sistem pengukuran, baik finansial maupun nonfinansial (Susanti dkk., 2026). Komitmen yang tinggi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dimiliki oleh Kabupaten Buleleng sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Bali. Hal tersebut tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebanyak 12 kali berturut-turut selama periode 2013–2024 atas laporan keuangannya. Capaian ini mencerminkan tingkat komitmen yang tinggi terhadap penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, meskipun prestasi tersebut menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan laporan keuangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, Teknologi informasi kini dimanfaatkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng untuk mendukung pengelolaan data secara lebih efektif, cepat, dan efisien. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) diterapkan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), yang mencakup proses pencatatan, pengel

ompokan, pengklasifikasian, hingga pemrosesan rutinitas keuangan daerah pada laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Buleleng menggunakan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD RI) sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan SIPD RI, yaitu aplikasi terpadu yang dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan berbagai ketentuan terkait pengelolaan keuangan daerah. Dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi yang terus berkembang, salah satunya melalui penggunaan SIPD RI.

Sesuai PP No. 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan serta kinerja instansi pemerintah, laporan keuangan diartikan sebagai wujud akuntabilitas atas pengelolaan dana negara maupun daerah selama periode tertentu. Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, karakteristik kualitatif berupa relevansi, keandalan, keterbandingan, serta kemudahan untuk dipahami harus dipenuhi oleh laporan keuangan tersebut. Di sisi lain, PP No. 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai penyajian tersusun atas posisi finansial dan seluruh transaksi entitas pelapor. Untuk lingkup pemda, LKPD disusun melalui tujuh unsur wajib, mencakup Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, serta CaLK. Proses pengolahan data dari tahap input sampai menghasilkan output menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai alat penyampaian informasi keuangan. Laporan ini juga berfungsi untuk menunjukkan berbagai kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam suatu entitas usaha atau perusahaan,

sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. (Mutuari & Yudiantara, 2021). Pentingnya kinerja laporan keuangan menunjukkan bahwa setiap perusahaan harus meningkatkan dan menjaga kinerja keuangannya (Palgunadi dkk., 2024).

PP Nomor 71/2010 menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan ditentukan oleh adanya karakteristik relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan untuk dipahami. Karakteristik relevansi berarti data yang disajikan mampu memengaruhi pertimbangan pengguna, mendukung penilaian atas kejadian terdahulu atau kini, dan berfungsi untuk memprediksi peristiwa yang akan datang memperkuat atau merevisi penilaian sebelumnya. Informasi dikatakan andal apabila tidak menyesatkan, bebas dari kesalahan material, mencerminkan penyajian jujur, serta dapat diverifikasi. Adapun keterbandingan memungkinkan perbandingan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas yang serupa. Kemudahan untuk dipahami berarti informasi disusun dalam format dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna agar dapat dianalisis secara efektif.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar pemerintahan yang baik, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam mengambil keputusan yang berorientasi pada kepentingan publik, dalam hal ini termasuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelayanan publik yang diberikan (Purnamawati & Rahayu, 2025). Laporan keuangan pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik, sekaligus menjadi indikator keberhasilan kinerja suatu instansi. LKPD yang memuat data keuangan menjadi acuan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik untuk pengguna eksternal. Sementara untuk internal,

laporan ini berperan sebagai sarana evaluasi atas kinerja yang dicapai. Selain itu, laporan keuangan juga memengaruhi aktivitas investasi, di mana laporan yang berkualitas tinggi dapat mengurangi asimetri informasi dan membuat proses investasi berjalan lebih efektif. Informasi akuntansi yang akurat sangat membantu manajemen dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan yang tepat. Dengan mempertimbangkan urgensi hal itu, penyusunan laporan keuangan oleh pemerintah harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik. Masyarakat menuntut laporan keuangan yang akurat karena hal tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola pendanaan program-program yang dijalankan (Ulisanti & Asrori, 2021).

Pemilihan Lokasi penelitian di DPRD Kabupaten Buleleng sebagai objek penelitian didasarkan pada peran strategis lembaga tersebut dalam tata kelola keuangan daerah. DPRD tidak hanya menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, tetapi juga terlibat langsung dalam proses penganggaran serta memiliki tanggung jawab administratif melalui Sekretariat DPRD (Setwan) sebagai entitas pengguna anggaran yang menyusun laporan keuangan sendiri. Dengan posisi tersebut, DPRD memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengawas pengelolaan keuangan daerah sekaligus sebagai bagian dari entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, DPRD Kabupaten Buleleng menjadi relevan untuk diteliti karena kualitas laporan keuangan pada instansi ini turut mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah secara keseluruhan. Jika pada instansi yang bertugas melakukan pengawasan masih terdapat hambatan dalam memahami

akuntansi, pengoperasian sistem informasi akuntansi SIPD RI, atau implementasi sistem pengendalian internal, maka hal tersebut berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan dan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Berikut merupakan struktur organisasi di Sekretariat DPRD Buleleng.



Gambar 1.1
Struktur Organisasi di Sekretariat DPRD Buleleng
(Sumber : Data Diolah Penulis, 2025)

Opini atas LKPD diberikan oleh BPK melalui proses evaluasi yang dilakukan setiap tahun. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, laporan keuangan diwajibkan berdasarkan PP Nomor 8/2006 Republik Indonesia mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain sebagai sarana pertanggungjawaban, laporan keuangan juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada pihak-pihak berkepentingan. Merujuk pada PP Nomor 71/2010, kualitas laporan keuangan

pemerintah ditentukan oleh adanya informasi yang relevan, andal, mudah dipahami, serta dapat dibandingkan (Mokoginta dkk., 2017).

Untuk memastikan laporan keuangan terbebas dari manipulasi, secara administrasi BPKPD melakukan penjadwalan rekonsiliasi (rekon) dengan setiap SKPD sebelum penyusunan buku laporan keuangan. Proses rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data laporan keuangan. Setelah rekonsiliasi selesai, hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sebelum laporan keuangan dijilid, dilakukan audit awal oleh BPK. Pada tahap ini, BPK memeriksa kelengkapan dan kebenaran administrasi. Jika ditemukan catatan atau kesalahan administrasi, BPKAD akan memberitahukan kepada pihak terkait untuk segera melakukan perbaikan. Sehingga dalam menentukan kualitas laporan keuangan yang dapat dipahami dari hasil fenomena tersebut dimana penyampaian informasi yang jelas dan sistematis memudahkan pihak terkait memahami apa saja yang perlu diperbaiki sebelum laporan keuangan final disusun.

Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan beberapa kendala dalam pencatatan laporan keuangan menggunakan SIPD RI yaitu, di DPRD Kabupaten Buleleng pada tahun 2024 saat input jurnal persediaan akhir di menu transaksi non anggaran nilai dari persediaan akhir tidak muncul. Sehingga di akhir tahun 2024 untuk mengantisipasi jurnal persediaan akhir tersebut akhirnya disarankan melakukan jurnal di menu jurnal umum.

Selain itu berdasarkan observasi awal peneliti, yang terjadi dalam pencatatan laporan keuangan DPRD Kabupaten Buleleng bahwa pada tahun 2024 bahwa dalam pencatatan laporan keuangan menggunakan SIPD RI masih terdapat beberapa

kendala teknis. Pertama, sistem pada SIPD RI belum dapat memastikan apakah pencatatan dilakukan menggunakan transaksi non-anggaran atau jurnal umum untuk persediaan akhir. Kedua, pada pencatatan jurnal penyusutan aset tetap, terdapat perbedaan hasil antara aplikasi yang digunakan oleh pengurus barang dengan yang tercatat di SIPD RI, terutama pada angka di belakang koma yang kadang tidak sesuai. Sehingga dalam empat kualitas kualitatif laporan keuangan dalam segi keandalan terjadi karena Ketidakjelasan metode pencatatan menimbulkan risiko ketidaktepatan data, sehingga mengurangi kepercayaan terhadap keakuratan laporan keuangan. Ketidakcocokan angka berpotensi menimbulkan kesalahan material dan menurunkan tingkat keandalan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan.

Di DPRD Kabupaten Buleleng, pencatatan laporan keuangan kerap tidak tepat waktu. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses penginputan data serta adanya kendala teknis berupa gangguan atau error pada sistem, mengingat seluruh perangkat pemerintah di Kabupaten Buleleng saat ini menggunakan aplikasi SIPD RI sebagai sistem utama. Kemudian kesalahan pencatatan berita acara reklas antara aset tetap yang ada awalnya, aset berupa rumah peninggalan sejarah dicatat dalam kelompok akun Gedung, Irigasi, dan Fasilitas (GIF). Namun demikian, pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan terdapat selisih dalam pengelompokan aset tersebut. BPK merekomendasikan agar aset dimaksud direklasifikasi ke dalam kelompok GIF P, khususnya pada subkategori saluran jalan dan bangunan irigasi, sesuai dengan karakteristik fisik dan fungsi aset yang sebenarnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, koordinasi dilakukan oleh Bidang Barang Milik Daerah BPKAD bersama Sekretariat DPRD selaku pihak pengelola aset. Hasil koordinasi memperlihatkan adanya kekeliruan dalam pencatatan aset yang berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan. khususnya pada laporan posisi keuangan (neraca).

Kesalahan klasifikasi aset tersebut berimplikasi pada pencatatan penyusutan dan akumulasi penyusutan, sehingga menyebabkan ketidaktepatan dalam penyajian nilai aset tetap dan akun terkait lainnya. Oleh karena itu, dilakukan reklasifikasi aset dari kelompok gedung dan bangunan ke kelompok jalan, irigasi, dan jaringan melalui penyesuaian jurnal akuntansi Perubahan itu kemudian diuraikan secara detail pada CaLK sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemda. Dengan demikian, permasalahan yang diidentifikasi dalam konteks ini adalah ketidaktepatan klasifikasi dan pencatatan aset tetap, yang secara langsung mempengaruhi keandalan dan kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. sehingga kesalahan pencatatan dan klasifikasi aset menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan ekonomi sebenarnya (*faithful representation*). Selain itu, nilai penyusutan dan akumulasi penyusutan yang salah menyebabkan angka aset tetap pada neraca menjadi tidak dapat dipercaya (*unreliable*).

Kendati demikian, pemberian opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan tidak serta merta menandakan laporan keuangan bebas total dari kelemahan atau kesalahan. Masih terdapat beberapa catatan dan temuan dari BPK Provinsi Bali terkait laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, yang dijabarkan dalam tabel berikut.

pemerintah daerah dalam rangka peningkatan mutu laporan keuangan, penguatan mekanisme pengendalian intern, serta peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Kabupaten Buleleng dapat terus mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Gunawan & Sujana, 2023). Akuntabilitas publik atas kinerja organisasi semakin berkembang, sehingga akuntansi menjadi kebutuhan yang bersifat rutin. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul peningkatan tuntutan terhadap kualitas laporan keuangan. Para pemangku kepentingan memerlukan informasi yang relevan dan bernilai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Darmawan dkk., 2024).

Kebaharuan penelitian ini terletak pada objek, fenomena, dan landasan teorinya. Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menitikberatkan pada organisasi perangkat daerah (OPD) atau pemerintah daerah secara umum, sementara penelitian ini secara khusus berfokus pada DPRD Kabupaten Buleleng yang memiliki tanggung jawab strategis dalam proses perumusan, pengelolaan, serta pelaporan keuangan daerah. Dari sisi fenomena, penelitian ini mengangkat isu aktual berupa pencatatan laporan keuangan yang dibuat secara manual kemudian beralih ke transisi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ke SIPD RI yang diwajibkan mulai tahun 2024. Proses transisi ini tidak sepenuhnya berjalan mulus, di mana ditemukan kendala teknis berupa keterlambatan input, error pada pencatatan, perbedaan hasil perhitungan, hingga jurnal ganda yang berdampak pada kualitas laporan keuangan. Fenomena spesifik ini belum banyak diteliti dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penggabungan terhadap tiga variabel pokok, yaitu tingkat pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis SIPD RI, serta sistem pengendalian intern, dilakukan dalam

penelitian ini guna menganalisis pengaruhnya terhadap mutu laporan keuangan pada institusi legislatif dan eksekutif daerah secara simultan. Dari segi teori, *Signalling Theory* yang menjelaskan bagaimana pemerintah daerah, melalui DPRD berupaya memberikan sinyal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat melalui laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut teori sinyal (*Signalling*) yang menurut Hartono (2005), Teori Sinyal menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki kualitas baik secara sengaja memberikan sinyal kepada pasar agar dapat dibedakan dari perusahaan yang kurang berkualitas. Agar isyarat tersebut dapat tersampaikan secara optimal, kemampuan dalam menangkap dan menginterpretasikan informasi secara akurat harus dimiliki oleh pasar, serta informasi tersebut tidak dapat dengan mudah direplikasi oleh perusahaan yang mempunyai performa kurang baik (Mengginson dalam Hartono, 2005). Penyampaian laporan keuangan kepada publik dijadikan sebagai salah satu media pemberian sinyal kepada pasar, sehingga diharapkan mampu menimbulkan respon positif atau negatif (Estrini dkk., 2013).

Pemahaman akuntansi yang dimiliki individu dalam suatu organisasi sangat penting. Aspek tersebut dipandang sebagai unsur fundamental dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pedoman serta ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan harus dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Pada pelaksanaannya, seluruh prosedur akuntansi dijalankan sehingga suatu laporan keuangan yang lengkap dan menyeluruh dapat dihasilkan. Tingkat penguasaan akuntansi diindikasikan oleh tingkat penguasaan seseorang terhadap seluruh rangkaian proses akuntansi, dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyajian

laporan keuangan yang dilakukan secara tepat dan dapat dipercaya. Namun demikian, dalam konteks Pemerintah Kabupaten Buleleng, beberapa kendala masih sering ditemui, seperti kesulitan dalam menerapkan SAP berbasis akrual secara konsisten, serta kurang optimalnya pengelolaan dan penatausahaan aset daerah. Selain itu, perubahan dan pengembangan sistem informasi keuangan seperti SIPD RI juga menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi, Kesalahan pencatatan, ketidakharmonisan data antar-SKPD, serta ketidaklengkapan dokumen pendukung masih dijumpai sebagai akibat dari kondisi tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap mutu laporan keuangan yang dihasilkan. Penguasaan akuntansi menjadi landasan utama yang diperlukan dalam proses penyusunan laporan keuangan (Dwiyanti & Werastuti, 2024).

Serangkaian proses yang mencakup pengategorian, klasifikasi, pencatatan, serta pengolahan transaksi keuangan daerah dimanfaatkan dalam penerapan sistem informasi akuntansi sehingga laporan keuangan dapat dihasilkan secara sistematis. Laporan ini nantinya akan menjadi sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah DPRD Kabupaten Buleleng, dalam proses pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan. Saat ini, penggunaan teknologi sistem informasi akuntansi dalam tata kelola pemerintahan menuntut aparatur untuk beradaptasi dalam menyelesaikan pekerjaannya, dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis komputer. Namun, apabila teknologi informasi yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal, maka penerapannya akan menjadi tidak efektif dan justru menimbulkan biaya yang lebih besar (Wahyuni & Herawati, 2024). Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Buleleng, beberapa kendala masih sering muncul,

di antaranya keterbatasan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan aplikasi keuangan seperti SIPD RI, sering terjadinya gangguan sistem yang menyebabkan keterlambatan input dan verifikasi data secara maksimal, serta kualitas jaringan internet di beberapa wilayah kerja yang belum stabil turut menghambat optimalisasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Kondisi tersebut membuat proses pengolahan data keuangan menjadi kurang efisien dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penyajian LKPD.

Jaminan terhadap kualitas laporan keuangan juga diberikan melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang memadai. Menteri atau pimpinan daerah bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemerintahan perlu diarahkan dan diawasi agar tata kelola keuangan negara dapat diwujudkan secara berdaya guna, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Aditya & Surjono, 2022). SPI sendiri merupakan suatu rancangan organisasi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melindungi aset, mendorong kepatuhan karyawan terhadap kebijakan perusahaan, serta menjamin keakuratan pencatatan akuntansi. Temuan Triyani dan Tubarad (2018) menyebutkan pengaruh SPI terhadap mutu pelaporan keuangan, sementara temuan Harun (2020) justru menunjukkan bahwa SPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Pengkajian yang dilaksanakan oleh Lestari dan Dewi (2020) pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, serta sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Badung telah dibuktikan. Artinya, mutu laporan keuangan ditentukan oleh sejauh mana pegawai memahami akuntansi. Selain itu, penggunaan sistem informasi akuntansi dapat membantu memperlancar pekerjaan, sedangkan keberadaan sistem

pengendalian intern berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan sekaligus mengidentifikasi potensi risiko. Dengan demikian, semakin baik pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berlandaskan pada fenomena serta uraian latar belakang yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pengaruh pemahaman akuntansi terhadap mutu laporan keuangan, serta mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia dan sistem pengendalian intern memberikan kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng. Dengan judul penelitian yaitu, “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut,

1. Pengetahuan akuntansi pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng masih belum merata, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian laporan keuangan sejalan dengan regulasi akuntansi pemerintahan.
2. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, khususnya melalui aplikasi SIPD

RI, dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan belum sepenuhnya optimal, yang ditandai dengan adanya kendala teknis, kesalahan input data, serta ketidaksesuaian hasil pencatatan dapat terjadi keandalan laporan keuangan.

3. Penerapan sistem pengendalian internal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng belum berjalan secara maksimal, terutama dalam aspek pengawasan, analisis risiko, pemisahan tugas, dan evaluasi temuan, sehingga berpotensi memengaruhi keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan yang dihasilkan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian sebelumnya, maka penelitian ini hanya di batasi pada Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah penelitian dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut,

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?

3. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah,

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis pemanfaatan pengaruh sistem informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ranah akuntansi sektor publik, diharapkan dapat diberikan melalui penelitian ini dengan memperluas kajian mengenai berbagai determinan yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi peneliti berikutnya yang bermaksud melakukan kajian lebih mendalam mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi pemerintah, serta implementasi sistem pengendalian

intern terhadap kualitas pelaporan keuangan, baik pada lingkup daerah maupun tingkat nasional.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman empiris dan wawasan mendalam mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam pengelolaan keuangan daerah. Peneliti memperoleh pemahaman tentang bagaimana sistem informasi akuntansi pemerintah diterapkan di tingkat daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah berbasis digital.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya dalam konteks implementasi sistem informasi pemerintahan. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak kampus dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, serta penelitian lanjutan yang relevan dengan tata kelola keuangan daerah berbasis teknologi informasi.

3. Bagi Sekretariat DPRD kabupaten Buleleng

Penelitian ini dapat digunakan bagi Sekretariat DPRD Buleleng agar terus meningkatkan pemahaman akuntansi pegawai, khususnya yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun pendidikan lanjutan terkait Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu,

pemanfaatan sistem informasi akuntansi perlu dioptimalkan dengan memberikan pelatihan penggunaan sistem serta melakukan pembaruan sistem secara berkala agar dapat menunjang penyusunan laporan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, penerapan sistem pengendalian internal perlu terus diperkuat melalui peningkatan pengawasan, evaluasi rutin, serta penegasan pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat semakin meningkat, akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku.

